



KINERJA EKONOMI MAKRO INDONESIA 2015 DAN PROSPEK EKONOMI 2016

Sony Hendra Permana*)

Abstrak

Kondisi ekonomi global yang masih belum pulih membuat kinerja ekonomi makro di tahun 2015 cenderung meleset dari target yang ditetapkan pada APBN-P 2015. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi masih cukup baik sebesar 4,73 persen dengan inflasi yang rendah sebesar 3,35 persen. Kondisi fiskal relatif aman, dengan defisit anggaran dan utang yang masih dalam kriteria yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Realisasi penerimaan negara sebesar Rp1.491,5 triliun, sementara realisasi belanja negara sebesar Rp1.810 triliun. Defisit anggaran lebih tinggi dari target, yakni sebesar 2,80 persen terhadap PDB. Perekonomian di tahun 2016 diharapkan akan lebih baik mengingat lelang sejumlah proyek infrastruktur sudah lebih dini dilaksanakan dan berlakunya MEA akan membuka pasar yang lebih besar bagi pelaku ekonomi domestik.

Pendahuluan

Tahun 2015 merupakan tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjalankan tugasnya selama satu tahun penuh. Selama periode tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai terobosan, yakni *pertama*, pemerintah melakukan reformasi struktur anggaran, melalui: (i) optimalisasi penerimaan, (ii) belanja yang lebih produktif dan berkualitas, dan (iii) pembiayaan yang berkesinambungan. Reformasi fiskal tersebut ditujukan untuk memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk belanja produktif, antara lain untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan program kesejahteraan sosial. *Kedua*, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan jangka pendek untuk mendorong kinerja ekonomi melalui 8 (delapan) paket

kebijakan ekonomi sejak September hingga Desember 2015.

Meskipun pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan perekonomian, namun tekanan eksternal maupun internal membuat kerja pemerintah belum maksimal. Perekonomian Indonesia tahun lalu bergerak dalam ketidakpastian ekonomi global yang tinggi. Terjadinya perlambatan ekonomi China, rendahnya harga komoditas dunia, terjadinya stagnasi perdagangan dunia, dan kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat memberikan tekanan terhadap kinerja ekspor nasional, nilai tukar rupiah dan potensi *capital outflow*. Ditambah lagi permasalahan di dalam negeri seperti ketersediaan infrastruktur yang belum optimal

*) Peneliti Muda pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan DPR RI.
Email: sony.hendra@dpr.go.id/sony_hendra@yahoo.com.



dan serapan anggaran yang rendah, khususnya di awal tahun, menyebabkan stimulus bagi pertumbuhan belum bekerja secara maksimal.

Kinerja Ekonomi Makro 2015

Berbagai tekanan baik eksternal maupun internal tersebut cukup memberikan tekanan bagi kinerja ekonomi makro Indonesia. Hal ini tercermin dari realisasi indikator ekonomi makro tahun 2015 yang cenderung meleset dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.

Tabel 1. Realisasi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2015

Indikator	APBN-P	Realisasi Des 2015
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,7	4,73*
Inflasi (% yoy)	5,0	3,35
Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	12.500	13.392
Suku Bunga SPN 3 Bulanan rata-rata (%)	6,2	5,97
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	60	50
Lifting Minyak (ribu barel per hari)	825	779
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.221	1.195

* Angka Sementara

Sumber: Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, 2015

Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 diperkirakan mencapai 4,73 persen. Pelemahan ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang melambat sebagai akibat rendahnya harga komoditas di pasar internasional, ditambah menurunnya daya beli masyarakat yang menekan sisi konsumsi. BPS menyebutkan inflasi mencapai 3,35% (yoy) atau lebih rendah dari target. Hal ini seiring dengan terjaganya kecukupan pasokan bahan pangan, yang didukung oleh semakin kuatnya koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia, dalam mendorong peningkatan produksi dan memperbaiki distribusi serta meminimalkan berbagai distorsi harga bahan pangan. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS mengalami tekanan sepanjang tahun 2015 dengan rata-rata sebesar Rp13.392/USD sebagai akibat kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat dan depresiasi Yuan.

Tingginya permintaan terhadap Surat Berharga Negara cukup menekan realisasi

suku bunga Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan menjadi sebesar 5,97 persen. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD50/barel disebabkan karena lemahnya permintaan global serta masih tingginya pasokan minyak dunia. Rata-rata *lifting* minyak mentah dan realisasi *lifting* gas Indonesia dibawah target atau sebesar 779 ribu barel per hari dan 1.195 ribu barel setara minyak per hari disebabkan karena penurunan kapasitas produksi sumur dan adanya kendala produksi.

Meskipun capaian ekonomi makro cenderung meleset dari target yang telah ditetapkan pada APBN-P 2015, namun secara umum capaian tersebut cukup baik di tengah tekanan ekonomi global saat ini. Pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan 4,73 persen masih lebih baik dibandingkan dengan capaian pertumbuhan negara-negara lain yang mengalami pelemahan lebih besar. Keberhasilan pemerintah menekan inflasi jauh di bawah target yang ditetapkan menunjukkan bahwa koordinasi tim pengendalian inflasi (TPI) dan tim pengendalian inflasi daerah (TPID) sudah berjalan dengan baik.

Kinerja penerimaan dan belanja negara tahun 2015 juga terbilang cukup baik meskipun masih di bawah target yang ditetapkan APBN-P 2015.

Total penerimaan negara sepanjang tahun 2015 mencapai Rp1.491,5 triliun (angka sementara) atau sebesar 84,7 persen dari target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.235,8 triliun atau 83 persen dari target. Penambahan target pajak sebesar Rp400 triliun di tahun 2015 cukup berat diwujudkan di tengah tren penurunan pertumbuhan ekonomi, khususnya pada sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan. Selain itu melemahnya impor dan harga-harga komoditas terutama CPO dan komoditas pertambangan turut mempengaruhi tidak tercapainya penerimaan perpajakan. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp252,4 triliun atau capaian realisasi sebesar 93,8 persen yang disebabkan turunnya pendapatan SDA migas dan pertambangan minerba karena turunnya harga komoditas batubara di pasar internasional.

Sementara itu, realisasi belanja negara tahun 2015 mencapai Rp1.810,0 triliun (angka sementara), atau 91,2 persen dari pagu belanja negara dalam APBN-P 2015. Realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1.187,1 triliun, atau 90,0 persen. Belanja Pemerintah Pusat

Tabel 2. Rincian Realisasi APBNP Tahun 2015 (Triliun Rupiah)

Uraian (Triliun Rupiah)	APBNP 2014	Realisasi s/d 31 Des (sementara)	% thd APBNP
PENDAPATAN NEGARA	1.761,6	1.491,5	84,7
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.758,3	1.488,2	84,6
1. Penerimaan Perpajakan	1.489,3	1.235,8	83,0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	269,1	252,4	93,8
II. Penerimaan Hibah	3,3	3,3	100
BELANJA NEGARA	1.894,1	1.810,0	91,2
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.319,5	1.187,1	90,0
1. Belanja K/L	795,5	724,3	91,1
2. Belanja Non-K/L	524,1	462,7	88,3
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	664,6	623,0	93,7
1. Transfer ke Daerah	643,8	602,2	93,5
2. Dana Desa	20,8	20,8	100
SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN	(222,5)	(318,5)	143,2
% Surplus/(Defisit) terhadap PDB	(1,9)	(2,8)	

Sumber: Kemenkeu, 2015

terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dengan realisasi sebesar Rp724,3 triliun atau mencapai 91,1 persen dan belanja non-K/L dengan realisasi sebesar Rp462,7 triliun atau mencapai 88,3 persen. Menurunnya tingkat penyerapan belanja K/L dipengaruhi oleh terhambatnya penyerapan di awal tahun akibat perubahan nomenklatur K/L. Sementara itu pencapaian realisasi belanja non-K/L diakibatkan adanya reformasi kebijakan subsidi di tahun 2015 sehingga mampu menekan konsumsi BBM bersubsidi menjadi lebih efisien sehingga mampu mengurangi tekanan fiskal. Realisasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa pada tahun 2015 lalu mencapai Rp623 triliun atau sebesar 93,7 persen. Anggaran dana desa yang mulai dialokasikan pada tahun 2015 sebesar Rp20,8 triliun telah disalurkan sepenuhnya. Realisasi defisit anggaran mencapai Rp318,5 triliun atau sebesar 2,80 persen terhadap PDB.

Secara umum kondisi fiskal tahun 2015 terbillang masih relatif aman, dengan defisit anggaran dan utang yang masih dalam kriteria yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Meskipun persentase realisasi penerimaan dan belanja lebih kecil dibandingkan tahun lalu, namun capaian pada tahun ini sesungguhnya lebih baik. Di sisi penerimaan, khususnya dari penerimaan pajak, realisasi sebesar 83 persen ini sangat baik mengingat target pajak pada tahun lalu yang dinaikkan sebesar Rp400 triliun di tengah

ekonomi global yang melemah. Capaian pajak sebesar Rp1.055 triliun perlu diapresiasi mengingat baru tahun 2015 realisasi pajak bisa melebihi Rp1.000 triliun. Di sisi pengeluaran, capaian 91,2 persen, relatif cukup baik terlihat dari belanja modal untuk infrastruktur serapannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2014. Belanja modal di APBN-P 2015 nilai belanja modal sebesar Rp213 triliun, tumbuh Rp138 triliun dari 2014.

Prospek Ekonomi Tahun 2016

Tahun 2016 merupakan momentum bagi perekonomian Indonesia untuk menjadi lebih baik. Berbagai terobosan yang telah dilaksanakan di tahun lalu seperti reformasi struktur anggaran dan paket kebijakan ekonomi diharapkan mampu memberikan stimulus yang positif bagi perekonomian. Perekonomian juga diperkirakan akan bergerak lebih awal menyusul langkah pemerintah yang melelang proyek infrastruktur 2016 sejak akhir tahun 2015 serta mempercepat penyerapan anggaran yang diharapkan mampu membantu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hingga akhir tahun 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melelang 4.964 paket proyek senilai Rp41,1 triliun. Dari jumlah paket yang sudah dilelang tersebut, kontrak untuk 714 paket proyek senilai Rp9,3 triliun sudah siap untuk ditandatangani.

Mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di awal tahun 2016 ini

merupakan suatu kesempatan yang dapat dimanfaatkan pelaku ekonomi atas keterbukaan dan integrasi pasar di Asia Tenggara. Dengan demikian akan membuka kesempatan untuk memperluas pasar bagi produk-produk dalam negeri. Selain itu juga akan membuka kesempatan yang lebih besar bagi tenaga kerja Indonesia untuk bersaing di pasar tenaga kerja ASEAN. Salah satu sektor yang menunjukkan perbaikan daya saing adalah produk makanan minuman yang ditunjukkan dengan defisit perdagangan sektor tersebut yang terus menurun. Defisit perdagangan sektor makanan dan minuman pada 2013 sebesar USD1,6 miliar terus turun menjadi USD900 juta di tahun 2014 dan kembali turun menjadi USD250 juta sampai dengan September 2015. Selain itu, sektor yang paling siap menghadapi MEA dari segi kualitas dan kuantitas adalah sektor pariwisata, mengingat standar kompetensi sektor tersebut sudah sama dengan negara-negara lain.

Potensi perluasan pasar dengan berlakunya MEA di 2016 ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga perlu menciptakan pengusaha-pengusaha baru, khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan meningkatkan kemudahan akses berusaha, antara lain akses modal melalui perbankan dan akses sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan wirausaha, dan akses pemasaran melalui kemudahan ekspor. Dengan hadirnya pengusaha-pengusaha baru akan membuat perekonomian berjalan lebih cepat dan dapat menciptakan lapangan kerja baru yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Penutup

Meskipun kinerja ekonomi makro Indonesia di tahun 2015 cenderung meleset dari yang ditargetkan, namun secara umum kondisi fiskal masih relatif aman dengan defisit anggaran dan utang yang masih dalam batas aman. Pertumbuhan yang masih cukup baik dan inflasi yang rendah menunjukkan bahwa kerja pemerintah dalam menggerakkan pemerintahan sudah berjalan walaupun belum maksimal. Realisasi penerimaan dan belanja negara juga cukup baik ditengah lesunya perekonomian global, penerimaan negara, khususnya perpajakan, telah menembus lebih dari Rp1.000 triliun dan pengeluaran pada

belanja modal untuk infrastruktur serapannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2014.

Di tahun 2016 ini diharapkan perekonomian akan lebih baik, dimana pemerintah telah melakukan lelang sejumlah proyek infrastruktur yang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyerapan anggaran guna menggerakkan perekonomian. Berlakunya MEA juga akan membuka kesempatan yang besar bagi pelaku ekonomi dalam negeri untuk mengembangkan jangkauan pasarnya, khususnya di ASEAN. Dengan kondisi ekonomi yang diperkirakan akan bergerak lebih cepat dan lebih besar ini, maka DPR RI perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap kinerja pemerintah khususnya dalam pengelolaan anggaran negara agar tetap berjalan pada koridor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Referensi

- “Defisit Melebar, Belanja Modal Didorong”, *Media Indonesia*, 5 Januari 2016.
- “Ekonomi Segera Bergerak”, *Kompas*, 4 Januari 2016.
- “Inflasi 2015 Berada dalam Sasaran Inflasi Bank Indonesia”, http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_180116.aspx, diakses tanggal 7 Januari 2016.
- Kementerian Lingkungan Hidup, 2007, *Rencana Aksi Nasional Dalam Menghadapi Perubahan Iklim*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- “Kondisi Fiskal Aman: Sejumlah Program Sulit Diakomodasi di Dalam APBN”, *Kompas*, 4 Januari 2016.
- “Lifting Minyak 2015: Produksi 27 Kontraktor di Bawah Target”, <http://industri.bisnis.com/read/20160105/44/507278/lifting-minyak-2015-produksi-27-kontraktor-di-bawah-target>, diakses 7 Januari 2016.
- “Manfaatkan MEA, Tumbuhkan Semangan Ekspor”, *Kompas*, 4 Januari 2016.
- “Menaker: Sektor Pariwisata Paling Siap Hadapi MEA”, <http://www.antaranews.com/berita/538746/menaker-sektor-pariwisata-paling-siap-hadapi-mea>, diakses 7 Januari 2016.
- “Realisasi Pelaksanaan APBNP Tahun 2015 Belanja Yang Lebih Besar dan Produktif Dengan Tetap Menjaga Kesenambungan Fiskal”, <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/SP-012016.pdf>, diakses 7 Januari 2016.